

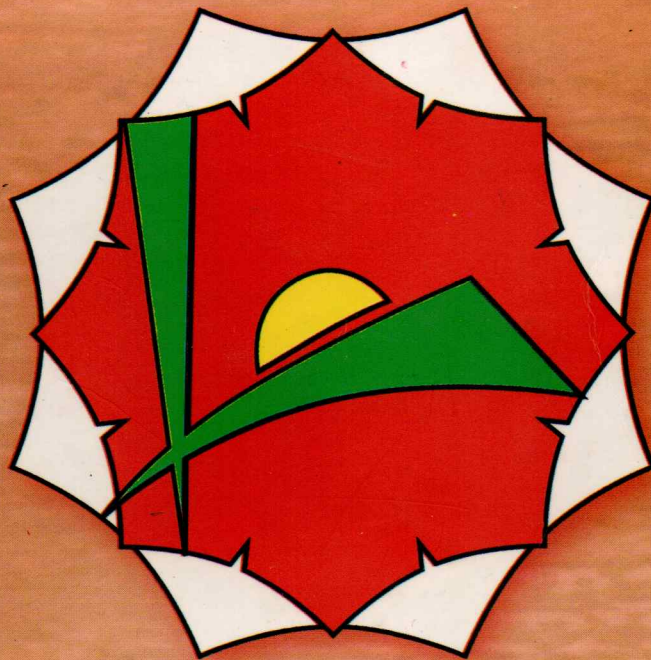


JURNAL LEDALERO

WACANA IMAN DAN KEBUDAYAAN
Discourse on Faith and Culture

Vol. 7, No. 2, Desember 2008

ISSN 1412-5420



PEMILU DAN DEMOKRATISASI

STFK LEDALERO

JURNAL LEDALERO

WACANA IMAN DAN KEBUDAYAAN
Discourse on Faith and Culture

Terbit dua kali setahun: Januari-Juni/Juli-Desember. Berisi tulisan ilmiah tentang teologi, filsafat, ilmu-ilmu sosial dan kebudayaan

Penanggung Jawab

Konrad Kebung (Ketua STFK Ledalero)

Ketua Penyunting

Leo Kleden

Wakil Ketua Penyunting

Philipus Tuile

Penyunting Ahli

John M. Prior

Konrad Kebung

Arnatus Woi

Georg Kirchberger

Paulus Budi Kleden

Wilhelmus Djulei Conterius

Yosef Suban Hayon

Ansel Doredae

Philipus Panda Koten

Lukas Jua

Richardus Muga

Yosef Keladu

Jozef Glinka (Universitas Airlangga – Surabaya)

Othmar Gächter (Institut Antropos – St. Augustin – Jerman)

Ennio Mantovani (Antropos International – Roma – Italia)

Penyunting Pelaksana

Leo Kleden

Philipus Tuile

Yosef Keladu

Paulus Budi Kleden

Yosef Maria Florisan

Resensi Buku

Yosef Suban Hayon

Alamat Redaksi

Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero

Maumere 86152 – Flores – NTT

Tlp. 086812105089

Fax: 0382/21892

email: jurnalledalero@yahoo.com

Percektakan

DAFTAR ISI

EDITORIAL:	
<i>Merajut Indonesia yang Demokratis</i>	96
PEMILU 2009 DAN UPAYA DEMOKRATISASI	
<i>Paul Budi Kleden</i>	100
GOOD GOVERNANCE DAN PEMILU 2009: KERINDUAN DI TENGAH KECELAHAN	
<i>Robert Mirsel</i>	128
PEMILU 2009 DAN UJIAN BAGI KUALITAS BERNEGARA	
<i>Bernardus S. Hayon</i>	153
JATI DIRI KEMANUSIAAN YANG BERAGAM BANGSA, BUDAYA DAN KELOMPOK ETNIS, APA KATA NABI YESAYA, RASUL PAULUS DAN YOHANES SANG PEMIMP?	
<i>John M. Prior</i>	169
NILAI PARTISIPASI POLITIK DALAM TERANG ETIKA POLITIK ARISTOTELES	
<i>Yosef Keladu Koten</i>	198
KONSEP RELIGIO CIVILIS: TELAAH PEMIKIRAN J. J. ROUSSEAU TENTANG HUBUNGAN ANTARA AGAMA DAN POLITIK	
<i>Otto Gusti</i>	224
MENAFSIR KEMBALI FIGUR BAPAK DAN PEMIMPIN	
<i>Leo Kleden</i>	245
INDEKS	263
RESENSI	265

Alatas, S.H. *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi. Penerj.* Nirwono. Jakarta: LP3ES, 1987.

ANTARA News. "Hanya 13,6% Keterwakilan Perempuan di Parlemen". <http://www.antara.co.id/arc/2008/2/17> diakses pada tanggal 15 Januari 2009, pkl. 9:09 AM.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. "Mobokrasi" dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, cetakan ketiga, 1990.

Dhyatnika, W., et al. "Air Zamzam di Senayan." *Dalam Tempo*, 13 Juli 2008.

Eloe, P.S. "Korupsi dan Penegakan Hukum di NTT". <http://watchterminal.net>.

Fatah, E.S. "Mobokrasi dan Kakostokrasi". *Tempo*, 13 Juli 2008.

Lukmanoro, T. "Good Governance: Sebuah Utopia?" *KOMPAS*, 17 Juli 2005:17.

Manggut, W. dan Agoeng, Wijaya. "Proyek Mahal Citra Bank Sentral." *Tempo*, Edisi 3-9 September 2007.

Manggut, W. et al. "Proyek Salap Bertabr Amplop". *Tempo*, 27 April 2008.

McAdam, Doug. *Political Process Model and the Development of Black Insurgency, 1930-1970*. Chicago & London: The University of Chicago Press, 1982.

Pradiyo, Sapto dan Rina Widiastuti. "Jalan Panas ke Kebon Sirih". *Tempo*, 21 September 2008

Setyarso, Budi et al. "Pesta Cek di Senayan". *Tempo*, 21 September 2008

"Ginandjar Keluhkan Rendahnya Respon DPR." *POS KUPANG*, 30 Desember 2008

"Al-Amin Divonis 8 Tahun Penjara". *POS KUPANG*, 6 Januari 2009

"277 Terdakwa Korupsi Divonis Bebas". *POS KUPANG*, 5 Januari 2009

"260 Rekening Liar Mulai Diinvestigasi". *POS KUPANG*, 9 Januari 2009

PEMILU 2009 DAN UJIAN BAGI KUALITAS BERNEGARA

Bernardus S. Hayon

Abstract

The quality of State life is mirrored in the life-view that has been adopted by it, and also in the atmosphere of democratic life found there. A democracy set within a political life that is free and open, allows daily life to correlate with other aspects. This is one insight from the Greek polis which formed a society that experienced itself as a social organism. A social organism should have its own spirit which Hegel calls an "ethical substance", a morality with a particular form which is incarnated in the single principle of the reunion of family (Familie), society (bürgerliche Gesellschaft) and State (Stadt) with customary law and its applications. The type of participation in society formed under a single moral principle is now being tested in a "democratic feast" (general election). As in an examination where persons are tested on their knowledge, the 2009 general election tests our quality as a State. One aspect of choosing displays "subjective knowledge about truth" before making ones choice but also "objective knowledge about reality" after making that choice. This is the logical flow between what I think (the ideal) and reality (experience).

Kata-kata kunci: pemilu, polis, demokrasi Pancasila, seni memilih

Sebuah Tanya Atas Pemilu

Setiap kali menjelang hajatan demokrasi alias pemilu, hampir pasti ada sejumlah asa yang tengah dikandung insan Indonesia. Harapan seperti ini bisa lahir dalam bentuk pertanyaan, misalnya: akankah pemilu 2009 menambah kekuatan baru bagi bangsa Indonesia untuk menjadi satu negara yang disegani di Asia, lantaran pertumbuhan ekonomi, kenyamanan politik dan hukum, serta kemerdekaan dan kedaulatan rakyatnya? Kerinduan akan perubahan ini pernah

diimpikan oleh Herbert Feith, bahwa era tahun 1990-an, Indonesia menuju kepada keadaan Thailand tahun 1980-an dengan parlemen yang berwibawa, kekuasaan yudikatif yang independen dan kebebasan pers yang beresikat lebih benar. Begitu juga R. William Liddle, seorang pengamat soal politik di Indonesia melihat sedikit harapan bagi demokrasi masa depan di Indonesia jika tiga unsur berikut dipertimbangkan: *Pertama*, perubahan yang evolusioner dan bukannya revolusioner¹. *Kedua*, dibutuhkan kelompok akademisi atau intelektual yang memelopori perubahan. *Ketiga*, perlu ada perubahan isi dari demokrasi yang ada. Kerangka dasarnya seperti UUD 1945 tetap, tetapi perubahan perlu dalam kaitannya dengan kepartaian dan peran ABR².

Entahkan pelbagai kerinduan, asa dan tanya seperti ini mesti dijawab? Tanya selalu menghantar orang pada titik start, titik refleksi atas realitas hidup. Bagi yang pernah bertanya, ia sedang dalam sebuah perjalanan. Yang tidak pernah dan enggan bertanya, ia sedang memutuskan jalan, di mana ia, dan bahkan yang lain seharusnya berjalan. Tanya tidak hanya sekedar membangun sebuah kuriositas atau kerinduan untuk mengetahui. Tanya adalah hasrat untuk membongkar sebuah "rahasia" kehidupan. Fobia untuk bertanya adalah kelesuan orang yang sedang hidup. Tanya adalah kerinduan untuk sebuah hidup. Tanya seperti ini juga tengah membangun kesadaran orang Indonesia untuk mengawasi setiap hajatan demokrasi untuk satu pencapaian yang masuk akal dan seimbang. Dengan bertanya seseorang bisa memastikan haknya yang berdaulat sebagai warga suatu bangsa. Setiap tanya reflektif yang dilontarkan adalah juga sebarang partisipasi warga dalam hidup bernegara, apalagi dalam setiap pesta demokrasi lima tahunan di Negara Indonesia. Pelbagai tanya, kerinduan, kecamasan dan harapan pada Pemilu 2009 ini mesti

dilontarkan, karena menurut J. Kristiadi, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh Bangsa Indonesia dalam Pemilu 2009 ini: *Pertama*, menciptakan sistem pemerintahan yang kompatibel dengan sistem kepartaian untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif. *Kedua*, meningkatkan kualitas partai politik sebagai institusi penopang demokrasi. *Ketiga*, meningkatkan kinerja lembaga perwakilan rakyat. *Keempat*, menyertakan keterlibatan 30 persen perempuan dalam lembaga perwakilan rakyat³.

Membaca kecenderungan untuk bertanya soal pemilu dan tujuan pemilu 2009 versi J. Kristiadi, rasa kuriositas dipancing untuk menelaah sejauh mana arti demokrasi dipahami dan dipraktekan di Indonesia? Seberapa besar warga Indonesia terlibat dan merasa diri dilibatkan dalam suatu proses berdemokrasi? Kekuatan strategi politik macam manakah yang sudah dipraktekan ketika Indonesia berdiri sebagai sebuah negara independen?

Sebuah Cerita dari Yunani dan Inspirasi dari Hegel

Dalam kesempatan pidato pemakanan yang diabadikan untuk Perikles, seorang pemimpin terkemuka dan politikus besar Athena, Thucydides memuji kekuatan politik rakyat Athena di Yunani. Ia, antara lain, mengatakan:

....Sistem pemerintahan kita bukanlah sebuah kopian institusi dari tetangga kita. Ia lebih merupakan persoalan keberadaan kita terhadap yang lain, ketimbang imitasi kita dari yang lain. Konstitusi kita disebut demokrasi karena kekuatan bukan terletak dalam tangan kelompok minoritas tetapi dalam seluruh rakyat. Jika berkaitan dengan satu debat soal pribadi, maka setiap orang sama di depan hukum. Tapi jika hal itu menyangkut penempatan seseorang pada jabatan dan tanggungjawab publik, apa yang dipertimbangkan bukanlah keanggotaan dari suatu kelas khusus, melainkan kemampuan aktual yang dimiliki seseorang. Hanya ketika kehidupan politik kita bersifat bebas dan terbuka, kehidupan harian kita merupakan satu korelasi dengan yang lain.

¹ Perubahan yang evolusioner dilanda dengan satu gerakan yang pelan, yang mengikuti struktur alamiah dari proses, yang dengannya sesuatu bergerak menuju perubahan. Namun perubahan seperti ini bisa bertahan sangat lama karena kualitas yang ditemukan dalam proses itulah yang diutamakan dan bukan soal hasil instan. Dalam perubahan yang bersifat revolusioner kita temukan satu gerakan yang mendasar, cenderung radikal dan cepat tapi terkadang bisa disertai dengan kekerasan (perlawanan bersenjata).

² Aswab Mahasin, *Menjemai Kultur Demokrasi*, Jakarta: LP3ES, 2000, pp. 83-84.

³ J. Kristiadi, "Pemilu 2009 Menjanjikan tetapi Mencekam" dalam *Kompas*, Nomor 186 Tahun ke-44, Tanggal 6 Januari 2009.

Kita tidak menjadi anggota suatu negara dengan tetangga yang bersebelahan dengan kita, jika ia ingin menikmati jalan hidupnya sendiri. Kita juga tidak menjokkannya ketika mereka melakukan kesalahan atau melukai perasaan kita. Kita bebas dan toleran dalam kehidupan privat kita, tetapi menyangkut hal umum kita tetap menjaga norma. ...Kita orang Athena, kita sendirilah yang mengambil sebuah putusan atau kita perlu mendiskusikannya agar kita tidak menemukan ketidaksesuaian antara kata-kata dan perbuatan; hal terburuk adalah langsung terlibat dalam aksi sebelum didiskusikan secara tepat⁴.

Pidato penghormatan terhadap Perikles ini menggambarkan satu komunitas di mana tiap warga (anggota) bisa hidup dan sungguh berpartisipasi dalam mencipta dan memelihara kesejahteraan bersama. Isi pidato di atas memperlihatkan demokrasi sebuah *polis* di Yunani yang membentuk sebuah organisme sosial, di mana tiap individu terlibat dalam pelayanan sosial untuk semua dan sebaliknya kepentingan semua (negara) melayani individu. Masyarakat kebanyakan dalam *polis* mengikuti apa yang menjadi kebiasaan yang ditetapkan negara demi kebaikan bersama. Secara formal, demokrasi dalam sejarah awalnya di Athena menghendaki warga kota untuk memegang kekuasaan. *Demos* (rakyat) memiliki otoritas untuk turut serta dalam fungsi legislatif dan yudisial. Partisipasi langsung dalam urusan negara adalah model dan konsep kewarganegaraan *polis* Athena. Karena itu, kita tidak dapat mengatakan bahwa seseorang yang tidak tertarik pada politik adalah seseorang yang sibuk dengan urusannya sendiri; kita, hendaknya, mengatakan bahwa ia tidak berurusan di sini sekarang⁵.

Realitas berdemokrasi ala *polis* Athena ini, mendorong Aristoteles, menegaskan bahwa manusia secara natural adalah makhluk sosial atau *zoon politikon* (*Politika* I,2). Konsekuensi dari pernyataan seperti ini adalah bahwa negara tidak akan menjadi satu akibat dari perserikatan

⁴ Pidato pemakaman yang terkenal ini disusun oleh Thucydides dan dimuat dalam karyanya yang berjudul, *The Peloponnesian War*, sebagaimana dikutip oleh David Held, *Models of Democracy*, United Kingdom: Polity Press, 1998, p. 16.

⁵ *Ibid.*

(persekutuan) warganya, karena kodrat manusia sudah dengan sendirinya membentuk dia untuk hidup bersama yang lain dalam suatu masyarakat.

Sambil mengacu pada model *polis* Yunani ini, Hegel memikirkan satu bentuk *substansi etika*. Dalam karyanya *Phänomenologie des Geistes* atau *Fenomenologi Roh* (1807), ia menandakan bahwa pada dasarnya hidup suatu bangsa merdeka merupakan satu moralitas yang riil, suatu moralitas dalam wujud tertentu, dan dengan demikian roh yang absolut tampak dalam sesuatu yang konkret, seperti nyata dalam keseluruhan adat, undang-undang atau suatu substansi (*res*) moral dengan identitas yang khas⁶. Menurut Georg Sans, Hegel menggunakan kata "substansi" kemungkinan disebabkan oleh fakta bahwa masyarakat (*society*) dibentuk dari satu norma yang tetap dan karena itu bersifat mengikat. Masyarakat juga terbentuk dari institusi-institusi yang bersifat stabil, yang mengatur seluruh kehidupan bersama dari setiap individu⁷.

Dalam karyanya *Garis-garis Besar Filsafat Hukum* (1821), Hegel memahami bahwa *substansi etika* ini meliputi tiga elemen utama yakni: keluarga (*Familie*), masyarakat sipil (*bürgerliche Gesellschaft*) dan negara (*Stadt*). Keluarga, bagi Hegel, merupakan satu komunitas etis yang paling dasariah (*natürliches sittliches*). Ia adalah satu institusi yang diciptakan dari roh yang dikaruniai dengan satu nilai etis. Keluarga merupakan satu kesatuan yang didasarkan pada cinta dan kesetiaan anggotanya⁸. Masyarakat sipil (masyarakat kebanyakan/madani), atau yang Hegel sebut dengan *bürgerliche Gesellschaft*,⁹ merupakan antitesis dari keluarga karena dalamnya terdapat

⁶ Gorge Sans, *Fenomenologi dello Spirito* (ms), Roma: Pontificia Università Gregoriana, 2007.

Teks lengkap dari pernyataan Hegel di atas adalah: *An sich oder unmittelbar ist das Leben eines freien Volks die reale Sittlichkeit, oder sie ist eine seinde, und damit ist auch diesel allgemeine Geist selbst ein einzelner, das Ganze der Sitten und Gesetze, eine bestimmte sittliche Substanz*. Bdk. Terj. Italia, *Fenomenologi dello Spirito*, a cura di Vincenzo Cicero Milano: Bompiani, 2000, p. 486.

⁷ *Ibid.*

⁸ Hegel, *Phänomenologie des Geistes*, Terj. Italia, *Fenomenologi dello Spirito*, oleh Vincenzo Cicero Milano: Bompiani, 2000, pp. 601-603.

⁹ Dalam Bahasa Jerman, tidak ada perbedaan antara kata 'sipil' dan 'penduduk kota', karena itu Hegel memilih untuk menggunakan kata *bürgerlich* (masyarakat kebanyakan, sipil) untuk

hubungan antara keluarga-keluarga yang disatukan oleh "sistem kebutuhan"¹⁰, yang kemudian berimplikasi pada perlunya satu administrasi yang mengatur keadilan, yang nyata dalam satu lembaga seperti kepolisian, kebutuhan akan peraturan dan keamanan. Masyarakat sipil dilihat sebagai satu perserikatan privat yang bekerja demi tujuan partikular. Tuntutan akan sebuah sistem ekonomi yang kuat menjadi landasan bagi keluarga-keluarga untuk mengembangkan perserikatan di antara mereka, yang melahirkan satu masyarakat warga.

Negara (*Stadt*) dalam pandangan Hegel adalah institusi yang coba menjembatani konflik dari *masyarakat* kebanyakan, di mana intese pribadi bersamaan dengan intese publik menyatu. Hegel mendefinisikan negara sebagai *substansi etika* yang sadar akan dirinya sendiri, satu perpaduan dari prinsip famili dan masyarakat kebanyakan. Pada tahapan ini karakter negara Hegel bukanlah suatu negara tipe liberal sebagaimana Locke dan Kant, yang tidak melihat negara sebagai satu sarana yang menjamin kesejahteraan dan kenyamanan hukum. Hegel juga tidak memahami konsep negara dalam arti demokrasi, yang kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat. Bagi Hegel, kebesaran sebuah negara terletak dalam negara itu sendiri. Negara dalam dirinya memiliki alasan yang cukup untuk berada (*ratione sufficiente per essere*). Dengan kata lain, kita dapat mengatakan bahwa negara Hegel tidak didasarkan pada individu melainkan pada idea tentang sebuah negara,

menunjukkan anggota dari satu persekutuan atau kewarganegaraan, sejauh mereka masuk dalam satu kelas penduduk kota. *De facto* kelahiran masyarakat sipil ini secara historis berhubungan dengan akses kelompok penduduk kota ini dalam satu era modern. Bdk. Gorge Sans, *Op. Cit.*, p. 10.

¹⁰ Dengan "sistem kebutuhan", Hegel menunjuk pada dua momen utama. Pertama, setiap aktivitas ekonomi tidak mengikuti tujuan *in se*, tetapi pada pelayanan kebutuhan dan keinginan tiap individu. Semua yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat seperti makanan, transportasi, dan jaminan kesehatan haruslah menjadi sarana yang melayani kepentingan warga. Karena itu sistem ekonomi ini dikembangkan karena setiap individu dalam famili tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri secara memuaskan. Ia membutuhkan satu kelompok massa yang lebih luas dari keluarga untuk membantu pemenuhannya. Momen kedua nyata dalam kerja. Kerja adalah satu mediasi yang nyata dalam menghasilkan atau memperlempngkapi kebutuhan partikular. Bdk. Hegel, *FDS*, p. 485. Dalam kerja, selain orang memenuhi kebutuhannya, orang juga merealisasikan dirinya sendiri, sebagaimana dilukiskan Hegel dalam relasi tuan dan hamba.

yakni satu konsep tentang kebaikan universal. Bagi Hegel negara adalah "kehendak ilahi" atau masuknya Allah dalam sejarah dunta¹¹. Dengan melihat negara sebagai "kehendak ilahi", Hegel menandakan bahwa negaralah yang memperkenalkan Allah dalam sejarah, yaitu tempat di mana ada kemungkinan untuk menemukan kerajaan kebenaran, kebebasan, keadilan, rasionalitas dalam sintesis, yaitu kerajaan hukum pada diri dan untuk diri. Dalam mendefinisikan negara, Hegel juga memasukkan satu idealisme yang berkaitan dengan moral, akal dan ide. Sububungan dengan moralitas ini ia bedakan antara etika dan Sittlichkeit atau etisitas.

Hegel berupaya memasukkan satu etika bercorak intensional dalam konsep tentang negara: artinya, etika yang mengikat perilaku moral seseorang, tetapi perilaku moral ini berorientasi sosial dalam pelaksanaannya. Etika Hegel, karena itu, diinspirasi oleh polis-Athens. Dalam polis ini, ide tentang masyarakat umum identik dengan institusi. Dalam polis Athens ditemukan ide tentang *bonum commune*. Menurut Hegel, tanpa memiliki satu model ideal seperti polis (dengan norma, hukum) tidak akan ada satu filafat praktis seperti etika¹². Moralitas menjaga perpecahan antara apa yang ada dan apa yang seharusnya ada; intensi atau maksud tidak seharusnya selalu direalisasikan, dengan demikian kebaikan yang benar tidak ditambahkan secara sempurna.

Dengan etisitas, Hegel mau mengatasi pemisahan antara interioritas dan ekterioritas, antara subyektivitas dan kebaikan. Etisitas meliputi aktivitas individu dalam komunitas dan kolaborasinya dengan yang lain, untuk mewujudkan *bonum commune*. Etisitas diaktualisasikan secara konkret dalam institusi sejarah seperti keluarga, masyarakat sosial (madani) dan negara. Dalam negara, individu mewujudkan diri sebagai manusia, yaitu mewujudkan etisitas (*Sittlichkeit*) sejati. Negara, karena itu, dilihat sebagai penjelasan konkret (*Menschwerdung*) dari etika, sejauh negara merupakan sintesis dari individu-individu dan kelompok-kelompok¹³ sosial yang saling

¹¹ Lucio Cartello, "Dialectica dell'Elicia Moderna", dalam http://venus.unive.it/cortello/theory/absir/abs_1001.htm.

¹² George Sans, et al.

¹³ Frans Ceunlin, *Sejarah Pemikiran Modern II* (ms), STFK Ledalero: 2003, pp. 136-137.

mengakui dalam satu tradisi kultural bersama di mana mereka masuk di dalamnya.

Hubungan antara moralitas dan etisitas dapat dijelaskan sebagai berikut; moralitas adalah satu refleksi (fleksibilitas) subyektif, ia adalah keutamaan individu sebagaimana adanya. Manusia dalam keutamaan moralnya adalah manusia yang menghargai hukum dan ia yang menjamin atau memproduksi kebajikannya dan juga kebajikan orang lain. Dengan demikian, moralitas adalah kehendak subyektif akan kebajikan; sedangkan etisitas adalah moralitas sosial, di mana ia merealisasikan kebajikan sesuai norma dan forma institusi yang merupakan salah satu bentuk usaha untuk mengatasi keterpecahan antara interioritas dan eksterioritas dalam menjalankan kewajiban moral¹⁴.

Ide Hegel tentang tiga elemen substansi etika (keluarga-masyarakat kebanyakan dan negara) dengan menghadirkan satu perilaku moral dan etisitas dalam tiga unsur ini memperlihatkan satu jalinan korelasi antara struktur asali atau natural dari manusia untuk menegaskan sosialisasinya. Realitas ini memperlihatkan juga satu posisi dan peran baik individu maupun kelompok sosial untuk berarena dalam ruang politik. Alfred Stephen menyebut tiga jenis arena politik¹⁵ yang bisa diperankan oleh individu atau kelompok sosial masyarakat yakni *state* (negara), *political society* (masyarakat politik) dan *civil society* (masyarakat kebanyakan/madani). Ke dalam arena *state*, Stephan mengelompokkan pemerintah, lembaga birokrasi dan administrasi, serta lembaga yang mengatur hubungan negara dan swasta. Kelompok arena *political society* adalah kelompok orang yang disiapkan untuk menyeimbangi persaingan untuk memperoleh kekuasaan publik dan kewenangan mengatur negara. *Civil society* adalah arena di mana masyarakat mensyeringkan gerakan dan persekutuan untuk menyusun pandangan dan memperjuangkan kepentingannya. Ketiga arena politik ini adalah cerminan dari keberagaman peran bernegara

yang saling mengandaikan dan tingkat partisipasi yang saling melengkapi.

Sebuah Kebangsaan Demokrasi Pancasila?

Adanya partisipasi langsung masyarakat dalam menentukan kehidupan bersama suatu bangsa, memungkinkan setiap individu dapat mengisi sekian kekuatannya dan mendorong tercapainya suatu *telos* (tujuan obyektif dari kepentingan bersama). Dalam konteks Indonesia, pemilihan legislatif dan presiden serta wakil presiden yang langsung oleh rakyat merupakan satu era baru kemenangan demokrasi di Indonesia. Kemenangan demokrasi di mana suara rakyat dihormati ini, kini diperjelas ketika Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 sehingga calon legislatif tidak lagi ditentukan berdasarkan nomor urut, tetapi berdasarkan suara terbanyak. Pasal 214 yang dimaksud berbunyi: "Calon terpilih adalah calon yang mendapatkan suara di atas 30 persen bilangan pembagi pemilu, atau menempati nomor urut kecil jika tidak memperoleh 30 persen BPP, atau menempati nomor urut kecil jika memperoleh BPP". Menurut penilaian MK, ketentuan pasal ini inkonstitusional karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat dan juga bertentangan dengan pasal 28 D ayat 1 UUD 1945¹⁶. Alasan MK ini benar karena penentuan caleg terpilih berdasarkan nomor urut kendati tidak mendapat dukungan mayoritas rakyat pemilu sama artinya dengan memasung suara rakyat berdasarkan pilihannya. Selain itu, sistem pemilihan berdasarkan nomor urut mempertebal kecenderungan para caleg untuk menetapkan barisan, mendekati pemimpin partai untuk mendapatkan nomor urut terkecil. Kolusi dalam pembelian nomor urut tetap langgeng.

Dengan pergantian sistem pemilihan legislatif dalam pemilu 2009 ini, dari nomor urut ke suara terbanyak, suara rakyat sungguh dihormati. Pengakuan semacam ini sungguh dibenarkan karena ada pertumbuhan demokratisasi di negara kita melalui sistem ini. Betapa tidak, jika MK tidak membatalkan sistem pemilu seperti ini, maka

¹⁴ Appunti sulla "Fenomenologia dello Spirito" di Hegel, dalam http://www.quinterna.org/lavori/fenomenologia_hegel.htm. Diakses tanggal 08 Oktober 2006. Lihat juga http://it.wikipedia.org/wiki/fenomenologia_dello_spirito. Diakses tanggal 09 Januari 2008.

¹⁵ Alfred Stephen, *Rethinking Military Politics*, Basil and the Southern Cone, Princeton University Press, 1988, p.3-4.

¹⁶ Kompas, 24 Desember 2008, hal 15, kolom 1-4.

orang baru sulit masuk ke lembaga legislatif, dan orang yang sama akan menduduki jabatan legislatif. Lahirlah satu dinasti legislatif berdasarkan nomor urut. Dinasti legislatif karena nomor urut sungguh melukai kedaulatan rakyat, walaupun benar bahwa tiap partai bisa menentukan sistem yang dipakainya dalam menentukan caleg. Berlakunya sistem pemilu di mana para calon legislatif ditentukan berdasarkan mayoritas suara memilih merupakan cerminan bagi kebangunan demokrasi Pancasila di Negara Indonesia. Rencana dan pemakaian sistem seperti ini seolah menggemakan adanya satu relevansi demokrasi Pancasila.

Salah satu ciri hakiki demokrasi adalah bahwa keputusan diambil dengan suara terbanyak. Karena itu menurut Franz Magnis Suseno, kalau demokrasi Indonesia didasarkan pada Pancasila, maka segenap keputusan mayoritas harus menjangkau lima sila dan tak pernah boleh dipakai untuk menyangkalnya. Namun, dia juga mengingatkan kita untuk menghindari satu tirani mayoritas yang mau membongkar persatuan bangsa. Sebagai negara yang mendasarkan asas negaranya pada Pancasila, suara mayoritas tidak bisa dipakai untuk tidak mengakui keutuhan dan kesamaan hak serta kedudukan suatu minoritas dan agama¹⁷. Peringatan akan adanya bahaya "tirani mayoritas" dalam sistem pemilu berdasarkan suara terbanyak merupakan satu kritik yang membuat kita berwaspada dan jeli dalam berdemokrasi, jangan sampai tirani mayoritas ini memperlemah mutu suatu sistem demokrasi yang hendak dibangun, apabila rakyat memilih tidak dipersiapkan dalam menentukan pilihan. Kecenderungan untuk memilih lantaran popularitas seorang caleg, seperti para artis yang belum siap untuk berpolitik akan mencoreng sistem mayoritas suara pada satu tirani demokrasi.

Ikron Agama dalam Pesta Demokrasi di Indonesia

Kebetulan pesta demokrasi Pemilu 2009 ini berada di antara dua pesta besar agama Kristen: Natal dan Paskah. Wacana seputar pemilu, strategi kontestan partai peserta pemilu, serta para caleg, menghiiasi pelbagai media tulis, cetak dan elektronik. Banyak orang

memanfaatkan fenomena ini untuk menghubungkan-hubungkannya dengan simbol agama, misalnya, dengan lambang-lambang Natal. Orang cenderung mencari apa pesan yang cocok dan tepat berkenaan dengan Natal dan kesempatan "berdagang" mencari dukungan. Butet Kartaredjasa, penulis buku *Presiden Gajayuan*, memiliki cara tersendiri dalam menghubungkan kedua momen pesta ini. Pesta Natal, Kelahiran Yesus Kristus yang diperingati setiap tanggal 25 Desember oleh kaum Kristiani justru dimanfaatkan Butet dengan membaca ikon-ikon yang lazim dalam perayaan Natal dengan hajat demokrasi (pemilu) 2009. Ia menghubungkan penafsiran atribut-atribut partai politik di Indonesia dengan ikon-ikon visual pesta Natal. Selama musim Natal, muncul pelbagai ikon visual yang akrab di dunia bisnis, rumah-rumah, serta gereja, antara lain: wajah sinterklas tua bertopi merah, pohon cemara, kandang domba, bayi, bintang. Bagi Butet, pesta Natal bisa menjadi inspirasi bagi para caleg ambisius nan cerdik. Aktualitas Natal bisa menjadi satu momen untuk berdagang diri. Apalagi, pesta agama seperti Natal akan sangat cocok bagi partai bermuansa agama dan caleg agamis, paling tidak mereka bisa merebut pengaruh. Kendati ikon visual natal kurang "monolitik" ada garis penghubung. Ambil saja ikon cemara, pohon dengan pelbagai bentuk kerucut menyerupai sebuah beringin: berdaun rimbun bisa saja menyerupai beringinnya Golkar. Domba di kandang? Bisa saja dihubungkan dengan gambar banteng bemoncong putih, identitas PDIP, meski ikon domba di kandang Betlehem tidak berwarna putih di balik lingkaran hitam. Ikon bintang, petunjuk arah bagi ketiga sarjana dari timur tentang sebuah kelahiran, bisa menghantar orang untuk berpikir tentang partai yang menggunakan bintang sebagai atributnya, seperti Partai Bulan Bintang.

Ikron-ikon visual Natal seperti ini kelihatannya kurang sreg karena akan dinilai sebagai satu pergeseran makna dari lambang partai peserta pemilu 2009. Namun yang menarik, Butet mengambil ikon Bayi Yesus di kandang, dan mengkondisikan satu pesan demokrasi, walaupun belum ada satu partai pun memilih gambar bayi sebagai lambang partainya. Ada alasan cukup filosofis yang mendukung pilihan Butet. Bayi Yesus di palungan oleh Butet dilihat sebagai simbol Harapan Baru. Isyarat Pembebasan. Bahkan, ikon Bayi Natal meniscayakan pergantian generasi. Satu jurus jitu untuk meniupkan

¹⁷ Franz Magnis Suseno, *Mencari Makna Kebangsaan*, Yogyakarta: Kanisius, 1998, p.67.

pemimpin muda.¹⁸ Yang muda sudah seharusnya menggantikan yang tua. Kendati ada nuansa getir dari suasana malam Natal (kegelapan, palungan dan kandang), hal itu seolah mengingatkan kita bahwa pergantian generasi tua ke generasi muda tidaklah selalu gampang. Harapan mesti dibangun di atas sekian penderitaan dan kesulitan. Bahwa proses instan tidak bisa menjamin kualitas sebuah pencaharian kebenaran. Tapi pesimisme ini tidak meniadakan sebuah kemungkinan lakon Natal Yesus. Natal selalu membawa sejuta kemungkinan, termasuk iktihar memperdagangkan bayi, demikian credo Butet dalam "Bayi"-nya.

Ikron memperdagangkan bayi (Natal Yesus) yang menginspirasi Butet dalam mencari satu reposisi makna pesta demokrasi sungguh mengafirmasi satu impian akan perubahan cara berpikir, perubahan mental, juga perubahan sebuah keinginan. Menilik wacana seputar calon presiden usungan dari pelbagai partai, memang tak satu pun kriteria umur: di bawah 65 tahun sebagai usia pertengahan (*middle age*); 65-74 tahun tergolong *junior old age*; 75-90 tahun tergolong *for-mal old age*; 90-120 tahun adalah *longevity old age* (orang tua yang berumur panjang).¹⁹ Kendati definisi kelompok orang berusia muda tidak dicantumkan dalam data WHO ini, kita bisa berandai-andai bahwa usia antara 40-50 bisa tergolong muda dalam hubungan dengan karier seseorang, termasuk di bidang politik. Menurut catatan *Kompas* Presiden RI periode 2009-2013, maka usia rata-rata mereka berada di atas 60 tahun, di saat pelantikan Oktober 2009: Wiranto (62 tahun, lahir 4 April 1947), Megawati Soekarnoputri (62 tahun, lahir 23 Januari 1947), Sultan Hamengku Buono X (63 tahun, lahir 2 Maret 1946), Akbar Tanjung (64 tahun, lahir 14 Agustus 1945), Sutiyoso (65 tahun, lahir 6 Desember 1944), Amin Rais (65 tahun, lahir 26 April 1944), Jusuf Kalla (67 tahun, lahir 15 Mei 1942), dan yang tertua Abdurrahman Wahid (69 tahun, lahir 4 Agustus 1940). Ada dua elite politik yang

terbilang muda hingga pelantikan Presiden Oktober 2009 adalah Hidayat Nur Wahid (45 tahun, lahir 8 April 1960) dan Prabowo Subianto (58 tahun, lahir 17 Oktober 1951). Berdasarkan pengelompokan usia WHO maka, para kandidat Presiden RI banyak yang termasuk dalam usia *middle age* (Akbar Tanjung, Sultan Hamengkubuwono X, Megawati Soekarnoputri, dan Wiranto). Sedangkan Sutiyoso, Amin Rais, Jusuf Kalla dan Gus Dur termasuk dalam kelompok *junior old age*²⁰.

Dari perbandingan usia para kandidat Presiden RI periode 2009-2013 ini terlihat bahwa generasi tua masih mendominasi pentas politik di RI. Walau demikian, ada juga harapan dan impian akan suatu perubahan lewat pemilu 2009, termasuk keterlibatan generasi muda. Menurut laporan hasil survei *Reform Institute* terhadap 2500 responden yang diambil secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk tiap provinsi, jenis kelamin dan wilayah tinggal penduduk (pedesaan dan perkotaan) sebanyak 68,88 persen responden menghendaki pasangan presiden terpilih 2009 adalah pasangan generasi muda dan tua. Sementara hanya 17,79 persen menghendaki pasangan presiden adalah pasangan generasi tua, sedangkan hanya 12,13 persen yang menghendaki pasangan itu, keduanya dari orang muda. Dalam survei ini pun terungkap bahwa mayoritas responden (65,7 persen) menghendaki pemimpin baru, sedangkan 32,32 persen tidak menghendaki pemimpin baru. Namun umumnya jawaban terhadap presiden yang diinginkan justru didominasi tokoh berusia di atas 50 tahun²¹.

Sebuah Seni Memilih

Hidup manusia dapat dikatakan sebagai hasil sebuah pilihan. Seluruh aktivitas kita dari bangun pagi hingga kembali menuju ke peraduan (tempat tidur) pada malam hari, senantiasa ditentukan oleh sikap memilih. Kalau saya sedang ngantuk di meja kerja, saya boleh memilih entahkan ke tempat tidur mengikuti kemauan mata, ataukah bertahan di depan komputer karena pekerjaan tertentu mesti

¹⁸ Butet Kartaredjasa, "Bayi" dalam *Kompas*, Nomor 174 Tahun ke-44, Tanggal 22 Desember 2008, p.3.

¹⁹ Sutta Dharmasaputra, "Menilik Usia Bakal Calon Presiden", dalam *Kompas*, Nomor 163, Tahun ke-44, Tanggal 11 Desember 2008, p.5.

²⁰ *Ibid*.

²¹ *Kompas*, Nomor 181, Tahun ke-44, Tanggal 31 Desember 2008, p.4.

menegaskan yang satu sekaligus membatalkan yang lain. Seni memilih, karena itu, menuntut seseorang untuk mengetahui apa yang menjadi pilihannya. Ada realitas, ada obyek yang nyata. Setiap realitas kehendak untuk memilih dan menentukan putusan.

Maurice Blondel, seorang filsuf Perancis dari abad modern mengatakan bahwa pengetahuan yang dimiliki sebelum seseorang membuat pilihan bersifat subjektif dan propulsif (dorongan) dan setelah itu menjadi sesuatu yang bersifat privat dan membentuk satu cara berada kita²². Apa yang dikatakan Blondel ini memperlihatkan bahwa sebelum kita membuat suatu pilihan, ada satu "pengetahuan subjektif tentang kebenaran". Pengetahuan inilah yang mendasari tindakan kita memilih. Baru sesudah membuat pilihan, ada juga "pengetahuan obyektif tentang realitas" (*objective knowledge of reality*)²³. Dalam observasi Blondel kita temukan bahwa satu pilihan yang dasariah mesti lahir dari proses refleksi, di mana ada runtutan logika antara apa yang saya pikirkan (ketahui) dan realitas. Inilah satu pengetahuan akan keberadaan yang lain (*connaissance de l'être*) sebelum memilih dan memiliki kenyataan yang ada (*l'être de la connaissance*) setelah memilih. Memiliki kesadaran akan korelasi logis ini memungkinkan seseorang untuk memutuskan sesuatu dan menempatkannya dalam kenyataan praktis²⁴.

Pengetahuan akan para caleg, program tawarannya, realitas politik dalam partai dan negara, merupakan persiapan yang mendasari seorang warga dalam menentukan pilihannya. Di samping aspek pengetahuan, sikap "takut memilih" juga mesti diwaspadai. Sikap takut atau takut-takut oleh Charles G. Valles dilihat sebagai musuh besar untuk membuat pilihan yang benar. Inilah musuh yang tersembunyi. Ketakutan merupakan musuh tersembunyi sekaligus

musuh terbesar dalam sikap memilih karena sikap demikian adalah satu bentuk penyerangan yang menghantam dalam kegelapan, yang tanpa diketahui secara jelas²⁵. Namun ketakutan atau pun keengganan memilih juga mesti dibaca secara lain. Ketakutan seperti ini bisa didasari oleh satu sikap apatis, di mana apatisme ini diakibatkan oleh satu kejenuhan dan ketidakpercayaan rakyat pada satu proses demokrasi yang tengah berlangsung. Ini juga adalah satu proses pembelajaran dan permunungan.

Daftar Pustaka

- Blondel, Maurice. *Action: Essay on a Critique of Life and a Science of Practice*. Penerj. Oliva Blanchette. Indiana: University of Notre Dame, 2003.
- Cartello, Lucio, "Dialettica dell'Eucità Moderna", dalam http://venus.unive.it/cortela/crtheory/abstr/abs_1col.htm. Edisi 10 Januari 2009.
- Ceunfin, Frans. "Sejarah Pemikiran Modern II" (ms). STFK Ledalero: 2003.
- Dharmasaputra, Sutta. "Menilik Usia Bakal Calon Presiden". Dalam *Kompas*, Nomor 163, Tahun ke-44, Tanggal 11 Desember 2008.
- Hegel. *Fenomenologi dello Spirito*. Penerj. Vincenzo Cicero Milano: Bompiani, 2000.
- Held, David. *Models of Democracy*. United Kingdom: Polity Press, 1998.
- H. Bouillard. *Blondel and Christianity*. Penerj. James M. Sommerville. Washington: Corpus Books, 1969.
- Kartaredjasa, Butet. "Bayi". Dalam *Kompas*, Nomor 174 Tahun ke-44, Tanggal 22 Desember 2008.
- Kristiadi, J. "Pemilu 2009 Menjanjikan tetapi Mencemaskan". Dalam *Kompas*, Nomor 186 Tahun ke-44, Tanggal 6 Januari 2009.
- Mahasin, Aswab. *Menyemai Kultur Demokrasi*. Jakarta: LP3ES, 2000.
- Sans, George. "Fenomenologi dello Spirito" (ms). Roma: Pontificia Università Gregoriana, 2007.
- Stephen, Alfred. *Rethinking Military Politics*. Bazil and the Souther Cone: Pricenton University Press, 1988.

²² Bouillard, H. terj. Ingris, *Blondel and Christianity*, Washintong: Corpus Books, 1969, p. 111.

²³ Maurice Blondel, Terj. Ingris, *Action: Essay on a Critique of Life and a Science of Practice*, Indiana: University of Notre Dame, 2003, p. 402.

²⁴ Bernardus Subang Hayong, *Decisive Option: The Necessity to Surpass Human Natural Order to Attain to Religious Promise in L'Action 1893 of Maurice Blondel*. Tesis Master dalam

Bidang Filsafat, Roma: Universitas Gregoriana, 2007, p. 115.

²⁵ Carlos. G. Valles, *Art of Choosing – Seni Memilih*, Yogyakarta: Kanisius, 1998, p. 36.